

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 32 tentang pemerintah daerah, menjelaskan bahwasannya sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah agar daerah mampu memanfaatkan secara maksimal keunggulan sumberdaya dalam wilayah tersebut. Indikator ekonomi yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat diartikan sebagai jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Widodo, 2006). Pemerintah daerah dapat mendorong perubahan PDRB dengan memberikan perhatian berupa kebijakan-kebijakan positif pada sektor-sektor dominan penentu besaran PDRB. Perhatian ini dimaksudkan agar kontribusi sektor-sektor yang dominan tersebut dapat dimaksimalkan. Akan tetapi, bukan berarti pemerintah harus mengabaikan sektor lain yang menjadi sektor sekunder pada daerah tersebut.

Dominasi sektor pertanian merupakan ciri umum bagi negara agraris, maka dari itu dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki sektor pertanian yang unggul dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Pangan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati dan air, baik diolah maupun tidak diolah. Komoditas pangan harus mengandung zat gizi yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kelompok yang tergolong komoditas ini meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura non-tanaman hias, dan tanaman lain penghasil bahan baku produk yang memenuhi batas pangan (Purwono dan Purnamawati, 2007). Salah satu komoditas yang memiliki nilai gizi tinggi dan menjadi bagian kelompok tanaman pangan adalah tanaman (komoditas) jagung.

Jagung merupakan salah satu jenis bahan makanan yang dapat digunakan untuk menggantikan (mensubstitusi) beras, sebab jagung memiliki kandungan zat gizi yang hampir sama dengan zat gizi yang terkandung dalam beras. Kandungan niai gizi yang terkandung dalam 100 gram jagung adalah 320

kal kadar kalori, kadar protein sebesar 8 gram, dan kadar karbohidratnya sebesar 73 gram, sedangkan untuk kandungan nutrisi pada satu butir biji jagung terdiri dari 11,40 persen air, 9,09 persen putih telur, 4,72 persen lemak, 71,35 persen karbohidrat, 2,04 persen serat kasar, dan 1,40 persen abu (AAK, 1993).

Kabupaten Kediri dikenal sebagai salah satu daerah produsen jagung dan sentra pertanian di provinsi Jawa Timur dengan luas sawahnya mencapai 47.520 hektar dan lahan bukan sawah seluas 91.085 hektar (Kabupaten Kediri *dalam* Angka, 2016). Sektor pertanian di Kabupaten Kediri terdiri dari beberapa sub-sektor yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan. Salah satu penyumbang terbesar pada sektor pertanian adalah sub-sektor tanaman pangan (Tabel 1.1).

Tabel 1.1
PDRB Sektor Pertanian Atas Harga Berlaku Tahun 2013 – 2015 Kabupaten Kediri (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015
Petanian, Kehutanan, Perikanan	6.604.650,1	7.363.449,1	8.084.525,8
1. Pertanian	6.029.936,5	6.695.372,8	7.334.469,1
- Tanaman Pangan	1.801.372,1	1.964.193,5	2.176.295,8
- Tanaman Hortikultura	136.195,2	149.181,3	164.889,9
- Perkebunan Semusim	556.223,1	648.288,2	669.493,3
- Tanaman Holtikultura dan Lainnya	623.333,3	681.988,7	746.341,4
- Perkebunan Tahunan	988.228,5	1.114.762,5	1.239.455,3
- Peternakan	1.839.315,9	2.039.936,5	2.232.021,1
- Jasa Pertanian dan Perburuan	85.268,4	97.022,2	105.972,3
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	128.443,1	142.596,5	153.040,2
3. Perikanan	446.270,5	525.479,8	597.016,5

Sumber: BPS Kabupaten Kediri dalam Angka, 2016

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sub-sektor peternakan dan tanaman pangan merupakan sub-sektor yang dominan dalam sektor pertanian. Hal ini dapat dibuktikan dari persentase sub-sektor tanaman pangan sebesar 26,91 persen dan persentase sub-sektor peternakan sebesar 27,60 persen. Sub-sektor tanaman pangan di Kabupaten Kediri ditunjang oleh beberapa komoditas yang dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Produksi Komoditas Sub-Sektor Tanaman Pangan Kabupaten Kediri Tahun
2013 – 2015

Jenis Tanaman	Produksi (ton)		
	2013	2014	2015
Padi	305.342	305.684	335.425
Jagung	302.042	318.023	324.262
Ubi Kayu	71.130	175.957	143.431
Ubi Jalar	4.652	9.323	10.990
Kacang Tanah	7.156	4.360	4.231
Kedelai	147	316	1.689

Sumber: BPS Indikator Pertanian Kabupaten Kediri, 2016

Berdasarkan tabel 1.2 pada tahun 2013-2015 dari keenam komoditas sub-sektor tanaman pangan di Kabupaten Kediri yang memiliki nilai produksi tiga teratas adalah komoditas padi, jagung, dan ubi kayu. Produksi komoditas padi terus mengalami peningkatan, di tahun 2015 mengalami peningkatan 9,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan komoditas jagung yang selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Komoditi ubi kayu dan kacang tanah selama tiga tahun terakhir produksinya mengalami fluktuasi, bahkan pada tahun 2015 mengalami penurunan produksi sebesar 18,48 persen dan 2,95 persen.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai identifikasi komoditas unggulan sub-sektor tanaman pangan dan strategi pengembangan produk olahan komoditas unggulan sub-sektor tanaman pangan di Kabupaten Kediri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah jagung merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana strategi pengembangan produk olahan komoditas jagung di Kabupaten Kediri ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah jagung merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui strategi pengembangan produk olahan komoditas jagung di Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan bahan kajian tentang komoditas unggulan sektor pertanian khususnya di Kabupaten Kediri.
2. Sebagai bahan kajian dan literatur yang dapat dipergunakan dalam penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi pemberian kebijakan yang akan diberlakukan.